

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

(Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN.Pkj)



OLEH :

EKY GUSDIKA

B111 13 020

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2017

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN
DENGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK**
(Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN.Pkj)

Oleh :

EKY GUSDIKA

B111 13 020

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana dalam Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2017

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURUDIS TERHADAP TINA PIDANA PENCABULAN
DENGAN KEKERASAN TRHADAP ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN.Pkj)

Disusun dan diajukan oleh:

EKY GUSDIKA

B 111 13 020

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, 14 Agustus 2017
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua,



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 19631024 198903 1 002

Sekretaris,



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan



Prof. Dr. Ahmadi Mitu, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Eky Gusdika

No. Pokok : B 111 13 020

Program : Ilmu Hukum

Departemen : Hukum Pidana

Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan
Dengan Kekerasan Terhadap Anak** (Studi Kasus
Putusan No. 2016/Pid.B/2016/PN.PKJ)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Juli 2017

PEMBIMBING I



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP : 19631024 198903 1 002

PEMBIMBING II



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP : 19671010 199202 2 002



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

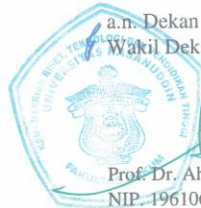
Nama	: EKY GUSDIKA
Nomor Pokok	: B11113020
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Dengan Ancaman Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 2016/Pid.B/2016/PN.Pkj)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2017

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,



Prof. Dr. Ahmadi Miru,SH.,MH
NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

EKY GUSDIKA (B11113020), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan dengan Kekerasan terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No. 10/Pid.B/2016/PN.PKJ), di bawah bimbingan Syamsuddin Muchtar selaku pembimbing I dan Nur Azisa selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil serta untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencabulan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan terhadap anak dalam Putusan Nomor: 10/Pid.B/2016/PN.PKJ.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pangkajene dengan melakukan wawancara hakim serta memperoleh data putusan. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian diuraikan secara deskriptif yaitu menguraikan sesuai dengan permasalahan kemudian menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pencabulan dengan ancaman kekerasan terhadap anak dalam putusan nomor 10/Pid.B/2016/PN.PKJ yaitu menggunakan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penerapan pasal tersebut telah sesuai karena unsur-unsur tindak pidana dalam pasal terbukti telah terpenuhi. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana terhadap terdakwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dengan memperhatikan faktor yuridis dan non yuridis berupa fakta-fakta hukum seperti keterangan dari saksi-saksi, berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan dan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa. Sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap perbuatan terdakwa telah terpenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dimana perbuatan terdakwa merupakan perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan karunia dan berkahnya yang telah diberikan kepada penulis, serta shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan dengan Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN.Pkj)**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis. Pertama-tama kepada sosok perempuan yang melahirkan dan membesarkan penulis yaitu Ibunda tercinta HJ Hasmawati. Kemudian kepada ayahanda penulis Muhammad Ali, SH. Kepada saudara penulis Adinda Adi Wira Yuha Pratama dan Dava Davanna. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga besar penulis, Hajma, Sitti Bahra Nur intan, Ali Muddin, Nur Sia, Meydi, Arfandi, ella, Rizkah Meydi, kakanda ‘Udda, Zulfikar, Halmia, Tamrin, adinda Adi, keponakan, dan keponakan Awal

Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada :

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Ariestina Pulubuhu MA** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Wakil Rektor lainnya;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum**, Bapak **Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H** selaku Wakil Dekan I, **Dr. Syamsuddin Mukhtar, S.H.,M.H** selaku Wakil Dekan II, dan **Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H** selaku Wakil Dekan III;
3. Bapak **Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.H.** selaku ketua bagian Hukum Pidana;
4. Bapak **Dr. Syamsuddin Mukhtar,SH.,MH** dan **Dr. Nur Azisa S.H.,M.H.** selaku pembimbing, terima kasih atas segala bimbingannya selama ini memberikan saran dan kritikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi;
5. Bapak **Prof. Dr. Muhadar,SH.,M.S.** **Prof. Dr. H.M. Said Karim,SH.,M.H.,Msi.**, dan Bapak **Dr. Abd. Asis, SH.M.H.** selaku dosen penguji penulis.
6. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, seluruh staf pengajar (Dosen), dan Staf akademik yang telah banyak membantu;
7. Bapak **Bonar Harianja, SH. MH.** Selaku Hakim Pengadilan Tipikor atas bimbingan dan kesediaannya melakukan wawancara;

8. Pegawai Pengadilan Negeri Makassar yang membantu penulis selama masa penelitian;
9. Saudaraku Azharul Nugraha,S.H. alias Arul sahabat seperjuangan yang senantiasa membantu kekurangan penulis sejak berada di Kota Makassar. Saudaraku Andi Satria SH alias Satria, Nilam Indira Jaya Kusuma SH atau Nilam , Muhammad Taufiq Guntur alias Opi, Riani Febrianti Putri SH alias Riri, Cakra Wira Pradana alais Cakra, Muhammad Kurniawan alias Wawin seperjuangan dari Makassar hingga kini, walau berpisah perguruan tinggi tapi semoga kita sukses bersama;
- 10.Keluarga ku HLSC-ku Merah Slalu Dihati tanpa terkecuali;
- 11.Keluarga Geng MBREDEST , Karno (Kumis), Aan (Gemuk), Wais (Jago Bikin Vidio), Fadel (Kecil), Adit, Yadin, Nindy (Cantik) Tanpa Terkecuali;
- 12.Sahabat-sahabat seperjuangan penulis menjalani perkuliahan di FH-UH hingga kini, keluarga besar “Satria, Kifli (pembalap), Azharul (Pembimbing dan Motivator), Damai (simodel cantik), Yusti (silucu cantik), Mesya, Nadya dan semuanya tanpa terkecuali;
- 13.Sahabat-sahabatku,Muhammad Taufik Hidayat SH dan Andre Salim SH, Andi Suharmika SH, Andi Helga Adalil SH,Andi Helsa Adalil SH, Muhammad Fadli SH, yang slalu bersama-sama dikampus dari semester awal. Azharul Nugraha yang telah memberi penulis tempat berteduh untuk menyelesaikan skripsi ini. Para rekan seperjuangan

mengejar SH, Muhammad Guntur, Ismi Fatimah, Ocha Kharisma, Muliadi Irwan (teman ujian skripsi), Riany Febrianti dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu;

14. Saudara-saudara GERCEP, Mika, Vikar, Fadli, Eko, Wawan, Wawin, Satya, Rais, Idi, Agung Pare, Satria, Billy, Eby, Fiqri, Kevin, Putra, Su. Tanpa terkecuali,

15. Sahabat-sahabat Penulis di Pangkajene Terutama Keluarga Besar sos 3 Smansa tanpa terkecuali, kita berpencar bukan untuk berpisah, tetapi untuk mengejar pendidikan, dan semoga kita dipertemukan kembali dalam kesuksesan;

16. Rekan-rekan KKN Reguler Gelombang 93 Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep Andi Pangeran, Ade Rezkiawa Embas, Muhammad Sabri, Fadel Ibrahim, Andi Ita Purnamasari, Andi Atika Khairana, Andi Restufa Ardianto, Hardianty, Muhri Anggraeny Terimakasih atas kerjasamanya, juga kepada Posko Kelurahan Kallabirang terima kasih atas amanah yang diberikan sebagai salah satu anggotanya;

17. Seluruh teman-teman ASAS 2013 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

18. Guru dan Alumni TK Jakarta Timur, SDN 07 Ciracas, SMPS Tonasa II, SMAN 1 Pangkajene, tanpa dukungan dari proses pendidikan

sekolah dasar dan menengah, penulis tidak dapat mengenyam perguruan tinggi;

19. Teman, sahabat dan keluarga yang telah memberikan dukungan, kritikan dan saran, serta doa, yang penulis tidak sempat sebutkan satu persatu, penulis memohon maaf apabila ada yang tidak disebutkan. semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua.

Akhir kata penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa penulisan ini masih mempunyai kekurangan-kekurangan. Hal ini bukanlah kesengajaan, melainkan karena keterbatasan penulis, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya besar harapan agar skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, Juli 2017

Penulis

Eky Gusdika

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tindak Pidana	8
1. Pengertian Tindak Pidana	8
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	11
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	20
B. Beberapa Peraturan Perundang-Undangan Terkait Tindak Pidana Korupsi.....	25
C. TindakPidana Korupsi	28
1. Pengertian TindakPidana Korupsi.	28

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi	31
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	39
4. Pengertian Pegawai Negeri Sipil	41
5. Penyalahgunaan Wewenang	43
D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	44
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Lokasi Penelitian	49
B. Teknik Pengumpulan Data	49
C. Jenis Dan Sumber Data	49
D. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan pada Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN MKS	51
1. Posisi Kasus	53
2. Dakwaan Penuntut Umum	55
3. Tuntutan Penuntut Umum	80
4. Amar Putusan	81
5. Analisis Penulis	81
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan pada Putusan Nomor 34/Pid.Sus- TPK/2015/PN MKS	95

1. Pertimbangan Hakim	95
2. Analisis Penulis	111
BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
E. Latar Belakang Masalah	1
F. Rumusan Masalah	4
G. Tujuan Penelitian	5
H. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
E. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana	6
6. Pengertian Tindak Pidana.....	6
7. Unsur-Unsur Tindak Pidana	9
8. Jenis-Jenis Tindak Pidana	11
F. Tinjauan Umum Mengenai Anak	15
1. Pengertian Anak	15
2. Batasan Usia Anak	16
G. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan	19

1. Pengertian Pencabulan.....	19
2. Tindak Pidana Pencabulan Menurut KUHP	26
3. Tindak Pidana Pencabulan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014	32
H. Pertimbangan Hakim dalam Mengambil Keputusan	35
1. Pertimbangan Yuridis.....	37
2. Pertimbangan Sosiologis	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
E. Lokasi Penelitian	40
F. Teknik Pengumpulan Data	40
G. Jenis dan Sumber Data	41
H. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Penerapan Hukum Pidana Materil atas Tindak Pidana Pencabulan dengan Ancaman Kekerasan yang Dilakukan Terhadap Anak pada Putusan No 10/Pid.B/2016/PN.PKJ ..	43
1. Posisi Kasus	44
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	46
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	48
4. Analisis Penulis.....	49
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan pada perkara No 10/Pid.B/2016/PN.PKJ	59
1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.....	59

2. Amar Putusan	65
3. Analisis Penulis.....	65
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya, pembinaan dan penegakan hukum di Indonesia tidaklah semudah membaca dan menerima bahan atau konsep yang terkandung atau yang termuat dalam perundang-undangan. Menegakkan hukum dan memberantas kejahatan tidaklah cukup berdasarkan hukum saja, tetapi juga harus ditinjau dari aspek budaya, moral, agama, bahkan para sarjana hukum berpendapat bahwa pidana adalah obat terakhir atau pembedaan terakhir.

Konsep Negara hukum di Indonesia yang menjunjung nilai-nilai moral dan kebudayaan menjadi titik dasar dalam pengendalian penegakan hukum di Indonesia. Terjadinya kejahatanakhir-akhir ini menjadi berita yang hangat, baik yang dimuat di media cetak, maupun media elektronik, yang tampaknya semakin hari semakin mewarnai berita utama media-media tersebut. Kecenderungan meningkatnya kejahatanbaik dari kualitas maupun dari segi kuantitas merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri lagi, hal ini dapat terlihat pada masyarakat dalam kehidupannya, mereka mempergunakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan kejahatan, serta kejahatan merupakan perbuatan yang sangat dicemaskan oleh berbagai kalangan masyarakat, kecemasan yang timbul bukan hanya dari kalangan masyarakat, akan tetapi juga timbul

dikalangan korban kejahatan itu sendiri. Penggolongan kejahatan tidak hanya ditujukan pada kejahatan pembunuhan, penganiayaan, pencurian, perampokan, melainkan juga kejahatan seks yang juga sangat bertentangan dengan norma-norma hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Kejahatan seks yang penulis maksud ialah Pencabulan.

Pencabulan merupakan kejahatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dan bertentangan dengan moral dan agama. Dikarenakan perbuatan pencabulan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang kerap kali terjadi dan tidak ada alasan pembenarnya. Pencabulan merupakan perbuatan yang dikutuk oleh masyarakat dan itu dapat saja terjadi dari mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat dekat atau kerabat yang dekat dengan korban. Di dalam kitab undang-undang hukum pidana (selanjutnya disingkat KUHP) telah diatur beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan dan tindak pidana perbuatan cabul menurut KUHP yakni pada Pasal 289 sampai Pasal 296. Dimana ancaman pidana pada Pasal 289 KUHP ialah selamanya Sembilan tahun penjara. Dan kejahatan penipuan seperti perbuatan cabul yang dilakukan orang dewasa dengan melakukan tipu muslihat terhadap anak dibawah umur, hal tersebut juga khusus diatur pada undang-undang perlindungan anak terbaru yakni Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 yang telah berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014 pada Pasal 82 ayat (1)

jo Pasal 76E UU RI No.35/2014 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan ancaman pidana pada Pasal 82 UU No.35 Tahun 2014 yakni pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 Milyar. Kejahatan kesusilaan yang disertai dengan tipu muslihat masih menjadi masalah yang cukup serius dan memerlukan pemecahan, upaya penanggulangan, baik secara preventif maupun represif dari semua pihak yang sangat diperlukan untuk menekan laju perkembangannya.

Perlindungan anak menurut undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menimbang bahwa negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia. Dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun dalam kehidupan bermasyarakat, sangat kompleks keadaannya dan permasalahan yang menyertai kehidupan anak, baik aspek pendidikan, kesehatan, maupun perlakuan yang tidak adil yang di pandang dari aspek hukum itu sendiri. Oleh karena itu sangatlah di sayangkan apabila pemerintah tidak secara serius menangani berbagai macam permasalahan yang sedang menimpa anak indonesia yang nasibnya kurang beruntung, seperti tidak mendapat perawatan, kasih

sayang, dan juga khususnya bimbingan dari orang tua dan masyarakat atau lingkungan pada umumnya.

Kasus-kasus seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan, kekerasan terhadap anak, sampai perdagangan anak, terhadap anak di bawah umur untuk di jadikan pekerja seks komersial juga kerap kali di tertibkan di media, seakan-akan tiada hari tanpa kasus mengenai anak yang terjadi di indonesia.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis akan mengangkat masalah perbuatan cabul yang dilakukan orang dewasa terhadap anak di bawah umur dengan judul :

“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan Terhadap Anak” (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN.Pkj).

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan penulis teliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil atas tindak pidana pencabulan dengan kekerasan terhadap anak dalam Putusan Pidana Nomor 10 Pid.B/2016/PN.Pkj?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 10 Pid.B/2016/PN.Pkj?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil atas tindak pidana pencabulan dengan kekerasan terhadap anak dalam Putusan perkara nomor 10 Pid.B/2016/PN.Pkj.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 10 Pid.B/2016/PN.Pkj.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan masukan bagi para penegak hukum dalam menangani masalah perbuatan cabul disertai penipuan terhadap anak.
2. Sebagai perbandingan bagi Pengadilan Negeri Pangkajene dalam menyelesaikan kasus-kasus perbuatan cabul terhadap anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana yang dikenal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimana pembentuk undang-undang mengenalnya dengan istilah strafbar feit di dalam bahasa Belanda, Strafbar yang berarti dapat dihukum, sedangkan feit yang berarti suatu kenyataan atau fakta. Strafbar feit menurut pendapat Simons ialah “kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab¹.

Sedangkan menurut pendapat Van Hamel, strafbar feit adalah “kelakuan orang (*menselijke gedraging*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan².

Beberapa asumsi atau pendapat mengenai pengertian tindak pidana menurut para ahli seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno, menurutnya tindak pidana yang dikenalnya dengan istilah perbuatan pidana yang berarti “perbuatan yang dilarang

¹ Topo Santoso, Seksualitas dan Hukum Pidana, IND-HILL-CO, Jakarta, 1997, hlm. 67

² Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana Rineka Cipta, Yogyakarta, 2008, hlm. 54

oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”³.

Berdasarkan asumsi di atas, dalam hal dilarang dan diancamnya perbuatan pidananya, yaitu 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimana suatu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, Kalimat asas yang tersebut di atas, lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada kejahatan, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), kalimat tersebut berasal dari Von Feurbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas tersebut yang dimaksud mengandung tiga pengertian yang dapat disimpulkan yaitu antara lain :

- a. Tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan suatu perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Perbedaan pandangan dan pendapat dari para ahli hukum maupun pembentuk undang-undang dalam hal mendefinisikan istilah

³ Ibid hal 5

tindak pidana yang disetarakan dengan istilah perbuatan pidana, maupun peristiwa pidana dan lain sebagainya kemungkinan untuk mengalihkan bahasa dari istilah asingnya yaitu *staftbaar feit*, akan tetapi dari pengalihan bahasa tersebut apakah berpengaruh atau tidak dalam makna dan pengertiannya, yang disebabkan sebagian besar di kalangan para ahli hukum belum secara jelas dan terperinci dalam menerangkan pengertian istilah tindak pidana, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal tersebutlah yang merupakan pokok perbedaan pandangan diantara para ahli hukum dalam mendefinisikan istilah tindak pidana.

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu Dari syarat-syarat di atas, perbuatan yang dapat dikatakan suatu tindak pidana ialah perbuatan yang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku dan disertai

ancaman hukumannya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam kita mengklasifikasikan suatu tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya yang perlu diperhatikan ialah apakah perbuatan tersebut telah melanggar undang-undang atau tidak. Berbagai macam tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif tersebut merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu antara lain sebagai berikut :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus* atau *Culpa* dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku dan disertai ancaman hukumannya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat di dalam

kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP⁴.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu antara lain sebagai berikut :

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁵

Dari uraian di atas, yang terpenting dalam merumuskan suatu tindak pidana ialah apakah dari perbuatan tersebut terdapat suatu sifat melanggar hukum, walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dalam suatu unsur tindak pidana, akan tetapi unsur tersebut sebenarnya dapat bertujuan untuk mengklasifikasikan bahwa benar perbuatan tersebut ialah suatu tindak pidana, dan unsur lainnya seperti kausalitas yang dimana sebab dan akibat menjadi tolak ukur dalam

⁴ Eriyantouw Wahid, Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana, Hal 46.

⁵ .Ibid, Hal 4.

menentukan bahwa itu suatu tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pembagian jenis-jenis tindak pidana atau kejahatan menurut ilmu pengetahuan hukum pidana yang dapat dibedakan dari beberapa sudut yang antara lain sebagai berikut:

- a. Berdasarkan sistem KUHP terdapat kejahatan-kejahatan dan kejahatan pelanggaran tersebut terdapat dalam KUHP. Pembedaan dan pembagian terletak pada Buku II KUHP yang mengatur tentang kejahatan dan Buku III yang mengatur tentang pelanggaran. Dalam ancaman pidananya, pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan yang dimana kejahatan yang ancaman pidananya menitikberatkan penjara, sedangkan pelanggaran lebih menitikberatkan denda atau kurungan. Secara kuantitatif, pembuat undang-undang membedakan kejahatan-kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seseorang melakukan kejahatan di luar negeri yang digolongkan sebagai kejahatan pelanggaran di Indonesia maka dipandang tidak perlu dituntut.
2. Percobaan dan membantu melakukan kejahatan pelanggaran tindak pidana tidak dipidana.

3. Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
- b. Dari segi perumusannya terdapat kejahatan formil dan kejahatan materil. Kejahatan formil adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang dianggap selesai dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan kejahatan materil adalah suatu tindak pidana yang selesai atau sempurna dengan timbulnya akibat yang dilarang.
- c. Dari segi sifat perbuatannya terdapat kejahatan komisi dan kejahatan omisi. Kejahatan komisi yaitu tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif yang melanggar larangan. Yang dimaksud perbuatan aktif tersebut adalah perbuatan yang mewujudkan disyaratkannya adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. Sedangkan kejahatan omisi dibedakan menjadi dua macam yaitu kejahatan omisi murni dan kejahatan omisi tidak murni. Kejahatan omisi murni adalah membiarkan sesuatu yang diperintahkan.
- d. Dari bentuk kesalahannya terdapat kejahatan sengaja dan kejahatan tidak sengaja. Kejahatan sengaja adalah tindak pidana yang di dalam rumusannya dengan kesengajaan atau mengandung unsur 12 kesengajaan. Sedangkan kejahatan kelalaian atau tidak dengan sengaja adalah tindak pidana yang dimana dalam rumusannya tidak mengandung unsur kesengajaan.

- e. Dari segi penuntutannya terdapat kejahatan aduan dan kejahatan biasa. Kejahatan aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan oleh orang yang merasakan dirugikan terhadap tindakan pelaku. Sedangkan kejahatan biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan.
- f. Dari segi perbuatannya terdapat kejahatan yang berdiri sendiri dan kejahatan yang diteruskan. Kejahatan yang berdiri sendiri yaitu suatu tindak pidana yang terdiri atas satu perbuatan, sedangkan kejahatan yang diteruskan yaitu suatu tindak pidana yang terdiri atas beberapa perbuatan yang mempunyai pertalian yang sedemikian eratnya sehingga harus dianggap satu perbuatan.
- g. Dari segi keadaan terdapat kejahatan selesai dan kejahatan berlanjut. Kejahatan selesai yaitu tindak pidana yang selesai terjadi dengan melakukan satu atau beberapa perbuatan tertentu, sedangkan kejahatan berlanjut yaitu tindak pidana yang dilakukan untuk melangsungkan suatu keadaan terlarang.
- h. Dari sudut berapa kali perbuatannya yang dilarang yang dilakukan terdapat kejahatan tunggal dan kejahatan berangkai. Kejahatan tunggal yaitu suatu tindak pidana yang terdiri atas satu perbuatan atau sekali saja dilakukan, sedangkan kejahatan berangkai ialah suatu tindak pidana yang terdiri dari beberapa jenis perbuatan

- i. Dari sudut kepentingan negara terdapat kejahatan politik dan kejahatan kelompok. Kejahatan politik ialah tindak pidana yang tujuannya di arahkan kepada keamanan negara dan terhadap kepala negara, sedangkan kejahatan kelompok yaitu tindak pidana yang tidak ditujukan terhadap keamanan negara atau kepala negara.
- j. Dari sudut unsur perbuatannya terdapat kejahatan sederhana, Kejahatan dengan pemberatan dan kejahatan peringanan. Kejahatan sederhana yaitu tindak pidana dalam bentuk pokok seperti yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Kejahatan dengan pemberatan yaitu tindak pidana yang mempunyai unsur yang sama dengan tindak pidana bentuk pokok akan tetapi ada unsur-unsur lain yang ditambahkan, sehingga ancaman pidananya lebih berat dari tindak pidana pokoknya. Sedangkan kejahatan peringanan ialah tindak pidana yang mempunyai unsur yang sama dengan tindak pidana bentuk pokoknya akan tetapi ditambahkan unsur-unsur lainnya yang dan dapat meringankan ancaman pidananya.
- k. Dari segi subyek hukumnya terdapat kejahatan propria (khusus) dan kejahatan komun (umum). Kejahatan propria atau kejahatan khusus adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang tertentu seperti pegawai negeri sipil atau yang mempunyai kedudukan struktural di pemerintahan. Sedangkan kejahatan

komun atau kejahatan umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang.

B. Tinjauan Umum Mengenai Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan yang maha esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁶ Anak merupakan makhluk sosial ini sama dengan orang dewasa. Anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang lain, Karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.

Anak di pahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umunya. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang di persiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali indonesia.

2. Batasan Usia Anak

Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak atau bukan, tentu harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur

⁶ Wagianti Soetodjo, Hukum Pidana Anak , PT. Refika Aditama, Bandung, 2006,hal. 11

tentang usia anak yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut;

- a. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yang pada intinya usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai 15 tahun.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Didalam undang-undang Hukum Perdata yang dikategorikan usia seorang anak ialah seseorang yang belum dewasa seperti yang tertuang pada Pasal 330 KUHPerdata.
- c. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Didalam undang-undang ini pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.⁷ Dalam pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah dibawah usia dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin.
- d. Undang-undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Di dalam undang-undang ini, yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 tahun (delapan) tahun tetapi belum

⁷ Tribowo Hersandy Febriyanto, Indonesia, Undang-undang Kesejahteraan Anak, UU No 4, L.N No. 32 Tahun 1979, T.L.N No. 3143, ps. 1 ayat (2)

mencapai umur 18 (Delapan Belas tahun) dan belum pernah kawin.⁸

Dari penjelasan pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikatakan sebagai anak adalah seseorang yang berumur dari delapan tahun sampai delapan belas tahun. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalam Undang-Undang ini, yang dikategorikan sebagai sistem peradilan pidananya dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa:

- (1) yang menyebutkan “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif”.
 - (2) a. Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan “penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”,
 - b. Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan “persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum”,
 - c. “Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan”.
 - (3) “Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi”.
- e. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Di dalam Undang-undang ini yang dikategorikan sebagai anak tertuang pada Pasal 1 ayat (5) yang menyebutkan “anak sebagai manusia yang berusia dibawah 18 (Delapan Belas) tahun dan

⁸ Chandra Ningsih, Ratih, Indonesia, Undang-undang Pengadilan Anak, UU No 3, L.N. No. 3 Tahun 1997, T.L.N No. 3668, ps. 1 ayat (1)

belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan nya.⁹

Menurut pasal ini yang dikategorikan sebagai anak ialah mulai dalam kandungan sampai usia delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰

Menurut pasal tersebut diatas bahwa yang dikategorikan sebagai anak ialah seorang yang berusia dibawah delapan belas tahun sampai dalam kandungan sekalipun masih dapat dikategorikan sebagai anak.

f. Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Pada Pasal 1 ayat (4) yang menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun.¹¹ Berarti kategori dikatakan usia seorang anak menurut pasal ini adalah belum berusia delapan belas tahun.

g. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

⁹ Tribowo Hersandy Febriyanto Indonesia, Undang-undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39, L.N. No 165 Tahun 1999, T.L.N. No. 3886, ps. 1 ayat (5).

¹⁰ .Soerjarno Soekanto, Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak, UU No 23, L.N No. 23Tahun 2002, T.L.N. No. 4235 ps. 1 ayat (1)

¹¹ Edward Elgar, Indonesia, Undang-undang Pornografi, UU No 44, L.N. No. 181 Tahun 2009, T.L.N No. 4928, ps. 1 ayat (4)

Pada Pasal 1 ayat (1) anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termaksud anak yang masih dalam kandungan. Berarti kategori dikatakan usia seorang anak menurut pasal ini adalah belum berusia delapan belas tahun.

Sedangkan definisi anak korban tindak pidana menurut Pasal 1 ayat (4) UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan: Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi setiap perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang dipersoalkan nanti.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Di dalam Pasal 289 KUHP yang dimaksud dengan pencabulan adalah Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, para ahli membuat penafsiran berbeda tentang pencabulan.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto bahwa:¹²

“pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”.

Dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bemoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku. R. Sughandhi dalam asumsi mengatakan tentang percabulan ialah:¹³

Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk persetubuhan dengan nya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.

Dari pendapat R. Sughandhi di atas, bahwa pencabulan tersebut adalah seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan istrinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai,

¹² Ahmad Kamil, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, Rajawali Perss, Jakarta, 2008, hal 93

¹³ Ibid.

sehingga apabila seseorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan.

Asumsi yang tidak sependapat dalam hal mendefinisikan pencabulan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya air mani seperti yang dikemukakan oleh PAF Lamintang dan Djisman Samosir yang berpendapat “Pencabulan adalah perbuatan seseorang yang dengan ,kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan dirinya.”¹⁴

Dari pendapat tersebut, ini membuktikan bahwa dengan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara dibunuh, dilukai, ataupun dirampas hak asasinya yang lain merupakan suatu bagian untuk mempermudah dilakukan nya suatu pencabulan. Menurut Arif Gosita, pencabulan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut:¹⁵

- a. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur (obyek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang dicabuli oleh seorang wanita.
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c. Pencabulan diluar ikatan pernikahan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataannya ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan

¹⁴ P.A.F Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. (Bandung. : Citra Aditya Bakti,1997) hal, 193

¹⁵ Ibid, hal. 194

kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.

Dari perumusan diatas menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai obyek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) karena perempuan identik dengan lemah, dan laki-laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya sangat kuat dan yang dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Fungsi dari kekerasan tersebut dalam hubungannya dengan tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. Kekerasan disini memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan korban. Ada casual verband antara kekerasan dan ketidakberdayaan korban. Contohnya kekerasan pada pencabulan yang digunakan sebagai cara dari memaksa bersetubuh juga pada pemerasan (Pasal 368) yang mengakibatkan korban tidak berdaya, dengan ketidakberdayaan itulah yang menyebabkan korban dengan terpaksa menyerahkan benda, membuat utang atau menghapuskan piutang.

- b. kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana bukan merupakan cara melakukan perbuatan. Contohnya kekerasan pada Pasal 211 atau 212.¹⁶

Sedangkan ancaman kekerasan mempunyai aspek yang penting dalam pencabulan yang antara lain sebagai berikut :

- a. Aspek obyektif, ialah (a) wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukan nya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna.
- b. Menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subyektif yang di objektifkan).

Aspek subyektif ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan itu tidak timbul pada diri korban tidak mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.¹⁷

Pengertian pencabulan tertuang pada Pasal 289 KUHP menyatakan sebagai berikut:

¹⁶ Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 64

¹⁷ Ibid, hal. 66

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun”.

Dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan antara lain:

- a. Korban pencabulan tidak harus seorang wanita, tanpa kualifikasi umur yang signifikan. Seharusnya wanita dapat dibedakan yang antara lain sebagai berikut:¹⁸

1. Wanita belum dewasa yang masih perawan
2. Wanita dewasa yang masih perawan
3. Wanita yang sudah tidak perawan lagi.
4. Wanita yang belum bersuami.

- b. Korban mengalami pemaksaan pencabulan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan perlakuan pelaku.

Dalam perkembangannya yang semakin maju dan meningkat dengan pesat ini, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya pencabulan seperti bentuk pemaksaan pencabulan yang dimana bukan vagina (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam pencabulan akan tetapi anus dan dubur (pembuangan kotoran manusia) yang dapat menjadi target pencabulan yang antara lain sebagai berikut :¹⁹

¹⁸ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, cet 2. Siunar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 5

¹⁹ Topo Santoso, *Op.cit*, hlm. 67

- a. Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin ke dalam vagina) tetapi juga memasukkan alat kelamin kedalam anus atau mulut.
- b. Memasukkan suatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) kedalam vagina atau mulut wanita.
- c. Caranya tidak hanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun diluar kehendak/persetujuan korban.
- d. Obyeknya tidak hanya wanita yang sadar, tetapi wanita yang tidak berdaya/pingsan dan dibawah umur juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju diluar kehendaknya tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuannya dibawah ancaman karena kekeliruan/ kesehatan/ penipuan atau karna dibawah umur.

Pelaku pencabulan terhadap anak-anak dibawah umur yang dapat juga disebut dengan child molester dapat digolongkan ke dalam (5) kategori, yaitu :

- a. Immature para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa
- b. Frustrated: para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (incest) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.
- c. Sociofathic para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatan nya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang kecendrungan agresif yang terkadang muncul.

- d. Sociofathi: para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatan nya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang kecendrungan agresif yang terkadang muncul.
- e. Michellaneous : yang tidak termasuk semua kategori diatas.²⁰

2. Tindak Pidana Pencabulan Menurut KUHP

Dalam KUHP perbuatan cabul diatur dari Pasal 289 sampai Pasal 296, dimana dikategorikan sebagai berikut:

- a. Perbuatan cabul dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan:²¹

Hal ini dirumuskan pada Pasal 289 KUHP sebagai berikut:

Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Disini tindak pidananya adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. Yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatanlain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Sebagai tindak pidana menurut pasal ini tidaklah hanya memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dikarenakan untuk menunjukan sifat berat dari

²⁰ Ibid hal. 68

²¹ Pasal 29 *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.

tindak pidana sebagai perbuatan yang sangat tercela, maka diadakan minimum khusus dalam ancaman pidananya..

b. Perbuatan cabul dengan orang pingsan

Hal ini dimuat pada Pasal 290 ayat (1) KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun: barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”.

Kata “pingsan” di sinonimkan dengan kata-kata “tidak sadar”, “tidak ingat”, sedang kata “tidak berdaya” adalah “tidak bertenaga” atau sangat lemah.

Kata “diketahuinya” adalah rumusan dolus atau sengaja. Dengan demikian si pelaku mengetahui bahwa yang dicabulinya tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak sadar.

“Pasal ini sama dengan Pasal 290 KUHP, menurut pasal ini melakukan perbuatan cabul adalah dengan seseorang yang diketahuinya orang itu pingsan atau tidak berdaya.

c. Perbuatan cabul dengan orang yang belum 15 tahun

Hal ini di muat pada Pasal 290 ayat (2) KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa

umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa orang itu belum pantas untuk dikawin.”

Pasal ini merupakan perlindungan terhadap anak/remaja. Perlu diperhatikan bahwa pada pasal tersebut tidak ada kata “wanita” melainkan kata “orang”. Dengan demikian, meskipun dilakukan terhadap anak/remaja pria, misalnya oleh homoseks atau yang disebut sehari-hari oleh “tante girang” maka pasal ini dapat diterapkan. Tetapi jika sejenis maka hal itu di atur Pasal 292.

Kata “diketahuinya atau patut disangka” merupakan unsur kesalahan (dolus atau culpa) terhadap umur yakni pelaku dapat menduga bahwa umur anak/remaja tersebut belum lima belas tahun.

d. Membujuk orang yang belum 15 tahun untuk dicabuli

Hal ini diatur pada Pasal 290 ayat (3) yang rumusannya sebagai berikut:

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
3. Barang siapa yang membujuk seseorang, yang diketahui atau patut disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul.

Hal ini tidak ada perbedaan dengan penjelasan sebelumnya kecuali *“pelaku”*. Pelaku pada Pasal 290 ayat (3) bukan pelaku cabul tetapi *“yang membujuk”*.

- e. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang sejenis:

Hal ini diatur pada Pasal 292 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, yang diketahuinya atau patut disangkanya belum dewasa dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.”

Pasal ini melindungi orang yang belum dewasa dari orang yang dikenal sebagai “homoseks” atau “Lesbian”. Dalam kamus besar bahasa Indonesia di muat arti homoseksual” dan “lesbian”:

“Dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama (homoseksual), sedang “lesbian”: wanita yang cinta birahi kepada sesama jenisnya; wanita homoseks.”

Pada umumnya pengertian sehari-hari, homoseks dimaksudkan bagi pria sedangkanlesbian dimaksudkan bagi wanita. Kurang jelas kenapa terjadi hal ini karena dari arti sebenarnya “homoseksual” adalah perhubungan kelamin antara jenis kelamin yang sama. Kemungkinan karena untuk wanita disebut lesbian maka untuk pria disebut homo seksual. Bagi orang dibawah umur, perlu dilindungi dari orang dewasa yang homoseks/lesbian, karena sangat berbahaya bagi perkembangannya.

- f. Dengan pemberian menggerakkan orang belum dewasa berbuat cabul

Hal ini diatur pada Pasal 293 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja mengajak orang dibawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya dibawah umur, mengerjakan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan perbuatan cabul itu dengan dia, di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
2. Penuntutan tidak dilakukan melainkan atas pengaduan orang yang terhadapnya kejahatan itu dilakukan.
3. Tenggang tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini lamanya masing-masing Sembilan bulan dan dua belas bulan."

Tindak pidana menurut pasal ini adalah menggerakkan seseorang yang belum dewasa dan berkelakuan baik untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul. Sebagai alat untuk tindak pidana mennggerakkan seseorang itu adalah memberi hadiah atau berjanji akan memberi uang atau barang dan dengan jalan demikian pelaku lalu menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan demikian menyesatkan orang tersebut. Orang disesatkan atau digerakkan itu haruslah belum dewasa atau diketahuinya belum dewasa atau patut harus di duganya bahwa orang itu belum dewasa. Sementara itu seseorang yang belum dewasa atau yang diketahuinya belum dewasa atau yang patut harus diduga bahwa ia belum dewasa tersebut adalah berkelakuan baik."

- g. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang dilakukan orang tua atau yang mempunyai hubungan.

Hal ini di atur pada pasal 294 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

1. “barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum dewasa atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya atau pun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”
2. Di ancam dengan pidana yang sama:
 - a. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawahnya atau orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya.
 - b. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat bekerja kepunyaan Negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit gila, lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukan kedalamnya.

Pada kasus “pelecehan seksual” yang selalu diributkan terutama antara atasan dengan bawahan pada hakikatnya dilindungi dengan pasal ini. Namun perlu disadari bahwa pembuktiannya bukan hal yang tidak rumit. Misalnya sorang direktur, pada suatu hari karena melihat pakaian sekretarisnya mencolok, akhirnya menimbulkan keinginan baginya untuk mengelus-elus pantat dan payudaranya. Karena tidak ada saksi lain atau alat bukti lain, bukan mustahil direktur tersebut menjadikan sekretaris tersebut sebagai tersangka.

Tindak pidana yang disebutkan dalam pasal ini adalah melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan, yang telah disebut juga dalam pasal-pasal sebelumnya. Menurut pasal ini perbuatan cabul atau persetubuhan dilakukan dengan mereka yang dikategorikan khusus yaitu yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga. Demikian juga jika yang melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan adalah pegawai

negri dan dilakukan dengan orang yang dalam pekerjaannya adalah bawahannya, atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga.

Menurut pasal ini maka perbuatan-perbuatan cabul atau persetubuhan adalah suatu tindak pidana biasa.

h. Memudahkan anak dibawah umur untuk berbuat cabul

Hal ini di atur pada pasal 295 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

(1) Di hukum:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan anaknya, anak tirinya atau anak piaraanya, anak yang dibawah pengawasannya semuanya dibawah umur yang diserahkan padanya supaya dipeliharanya, dididik atau dijaganya, atau bujangnya atau orang bawahannya, keduanya dibawah umur yakni semua orang tersebut itu melakukan perbuatan cabul dengan orang lain;
2. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dalam hal di luar yang di sebut pada butir 1 orang yang dibawah umur, yang diketahui atau patut dapat disangkanya bahwa ia dibawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan orang lain.

(2) Kalau melakukan kejahatan itu oleh yang bersalah dijadikan pekerjaan atau kebiasaan, maka hukuman itu boleh ditambah sepertiganya.

3. Tindak Pidana Pencabulan Menurut UU. No 23 Tahun 2002 Jo No 35 Tahun 2014

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perbuatan cabul diterangkan juga lebih terkhusus pada Pasal 82 ayat (1) jo 76E UU No.35 Tahun 2014.

Pada Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 berbunyi:

- (1) "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 berbunyi:

"Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi setiap perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang dipersoalkan nanti. Secara umum unsur-unsur pencabulan terdiri dari dua unsur yaitu unsur bersifat obyektif dan bersifat subyektif seperti yang tercantum dalam Pasal 289 yang berbunyi:

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun".

Dari bunyi pasal di atas, dapat dirincikan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur-unsur obyektif

1. Perbuatan Pencabulan

Unsur-unsur pencabulan merupakan unsur yang terpenting dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, hal ini disebabkan apabila perbuatan pencabulan tidak terjadi maka perbuatan tersebut belumlah dapat dikatakan telah terjadi perbuatan percabulan. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh S. R. Sianturi bahwa untuk diterapkan pasal 289 adalah apabila kemaluan silaki-laki hanya sekedar menempel diatas kemaluan perempuan tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan tetapi pencabulan.

2. Perbuatannya yaitu orang dewasa\

3. Objeknya yaitu orang

b. Unsur Subjektif

Sedangkan unsur subyektifnya ada satu, yaitu yang diketahuinya belum dewasa atau patut diduga belum dewasa. Sama seperti persetubuhan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat. Kalau persetubuhan terjadi antara dua orang yang berlainan jenis, tetapi pada perbuatan ini terjadi diantara dua orang yang sesama kelamin baik itu laki-laki sama laki-laki (Sodomi atau Homoseksual) ataupun perempuan dengan perempuan (Lesbian).

Yang menjadi subyek hukum kejahatan dan dibebani tanggungjawab pidana adalah siapa yang diantara dua orang yang telah dewasa, sedangkan yang lain haruslah belum dewasa. Pembebasan tanggungjawab pada pihak orang yang telah dewasa adalah wajar karena rasio dibentuknya kejahatan ini adalah untuk melindungi kepentingan hukum orang yang belum dewasa dari perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan hukum.

D. Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Putusan

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.²²

Hakim menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup

²²<https://zulfanlaw.wordpress.com/2008/07/10/dasar-pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-bebas-demi-hukum>. Diakses pada tanggal 12 Februari 2017, pukul 20.30 WITA.

panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau selesainya satu perkara di pengadilan.

Hambatan atau kesulitan yang ditemui hakim untuk menjatuhkan putusan bersumber dari beberapa faktor penyebab, seperti pembela yang selalu menyembunyikan suatu perkara, keterangan saksi yang terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, serta adanya pertentangan keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Hakim sebagai orang yang menjalankan hukum berdasarkan demi keadilan di dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang ditanganinya tetap berlandaskan aturan yang berlaku dalam undang-undang dan memakai pertimbangan berdasarkan data-data yang autentik serta para saksi yang dapat dipercaya. Tugas hakim tersebut dalam mempertimbangkan untuk menjatuhkan suatu putusan bebas dapat dilihat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: "jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas."²³

²³ Departemen Kehakiman, 1981, Pedoman Pelaksanaan KUHAP Jakarta: Yayasan Pengayoman, hlm. 86

Hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan harus berdasarkan kepada bukti-bukti autentik, seperti surat dakwaan, keterangan saksi dan bukti-bukti lainya seperti yang diperlukandalam pelaksanaan proses persidangan maupun sebelumnya maka jelas surat dakwaan tersebut tidak relevan dijadikan sebagai dasar pembuktian maka dakwaan akan kabur atau *obscurlibel*.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan, juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan. Pertimbangan hakim meliputi :

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:²⁴

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Tuntutan pidana
3. Keterangan saksi
4. Keterangan terdakwa
5. Barang-barang bukti

²⁴ Departemen Kehakiman, 1981, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP* Jakarta: Yayasan Pengayoman, hlm. 86.

b. Pertimbangan Sosiologis

Nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, karena memang hukum adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Demikian juga hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan. Sehingga dengan ditegakkannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Meskipun sebenarnya keadilan itu sendiri bersifat subyektif dan individualistik.

Dalam memutuskan suatu perkara, kedua pertimbangan diatas secara teoritis harus mendapat perhatian secara proposional dan seimbang. Meskipun dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk mengusahakan kompromi terhadap unsur-unsur tersebut. Pertentangan yang terjadi dalam setiap menanggapi putusan hakim terhadap suatu perkara, dengan apa yang diinginkan masyarakat.

Maka setiap individu hakim, dituntut bersikap lebih teliti dan jeli dalam memeriksa perkara dan jernihserta cerdas berpikir dalam mengambil putusan. Hakim dituntut lebih bijaksana dalam menyikapi pendapat masyarakat. Pendapat masyarakat (umum) tidak boleh diabaikan begitu saja dalam mempertimbangkan suatu perkara. Hakim harus ekstra hati-hati dalam menjatuhkan putusan. Jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum karena disebabkan sikap tidak profesional dalam menangani perkara, begitu juga secara mudah pula melepaskan

pelaku kejahatan dari hukuman yang seharusnya dijatuhkan. Hal itu tentu saja harus sesuai dengan keyakinan hakim yang professional dalam memutus sebuah perkara agar terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat.²⁵

²⁵<http://setaaja.blogspot.co.id/2012/03/pertimbangan-sosiologis-dalam-putusan.html/Diakses> pada tanggal 20 Februari 2017, pukul 10.45 WITA.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis dalam penulisan skripsi ini nantinya yaitu pada Kabupaten Pangkajene. Sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini berkaitan dengan Masalah Pencabulan dengan Ancaman Kekerasan yang dilakukan Terhadap anak , maka penulis memilih lokasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri, Kabupaten Pangkajene.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, , buku-buku, dan karya ilmiah hukum serta bahan lain yang digolongkan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer.

Merupakan bahan hukum yang berasal dari Putusan Pidana Nomor 10 Pid.B/2016/PN.Pkj, peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 3 tahun

1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian, tulisan artikel internet atau cetak yang berkaitan dengan Pencabulan dengan Ancaman Kekerasan yang dilakukan terhadap anak.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi di pengadilan Negeri Pangkajene, utamanya hakim pengadilan negeri Pangkajene yang mengadili kasus Pencabulan dengan Ancaman Kekerasan yang dilakukan terhadap anak ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah studi kepustakaan yaitu melalui studi pustaka dari berbagai literatur yaitu Putusan Pidana Nomor 10 Pid.B/2016/PN.Pkj, peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, laporan hukum, jurnal hukum, dan karya ilmiah hukum yang berhubungan dan mendukung penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan tahapan pengumpulan data, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori dan masalah yang ada, selanjutnya menarik kesimpulan

guna menentukan hasilnya. Kemudian diuraikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Pencabulan dengan Kekerasan Terhadap Anak pada Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN.PKJ.

Sebelum membahas bagaimana penerapan hukum pidana materil dalam kasus yang penulis teliti, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan apa sebenarnya di maksud dengan hukum pidana materil. Hukum pidana materil (Belanda: *materiele Strafrecht*, inggris substantive criminallaw) Hukum pidana materil menurut norma-norma (kaidah-kaidah), yaitu aturan-aturan sebagai pedoman untuk bersikap dan bertindak dalam masyarakat. Norma-norma ini bersifat perintah atau larangan.²⁶

Van Bemmelen menjelaskan sebagai berikut :

”Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu”²⁷

Hukum pidana materil meupakan salah satu sumber hukum yang menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang, sumber hukum materil berasal dari perasaan hukum masyarakat, pendapat umum, kondisi sosial ekonomi, sejarah, agama

²⁶ Fran Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 7

²⁷ Amir Ilyas, *Op. Cit*, hlm.9

moral, geografis, politik hukum, dan lain-lain. Hukum materil ini merupakan faktor yang mempengaruhi materi (isi) dari aturan-aturan hukum.

Selain pengertian di atas, Tirtamidjaja menyatakan bahwa :

“Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana”.²⁸

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupa mencari dan membuktikan kebenaran hukum materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelum Penulis menguraikan mengenai tepat atau tidaknya penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana dalam Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN.PKJ, maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus, dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum yang penulis akan uraikan sebagai berikut:

1. Posisi Kasus

Pada hari Senin tanggal 09 November 2015 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di Kabupaten Pangkep Terdakwa bernama Baharuddin Alias Baha Bin Musa telah memegang alat kelamin korban NA Binti A.

²⁸ Leden Marpaung, 2008, Asas-Teori-Praktik-Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2

Awalnya korban NA Binti A sedang berjalan menuju sekolah di SMK, kemudian korban NA Binti A melihat dari jauh terdakwa sementara duduk di pos warga di dekat jalan masuk ke sekolah sehingga korban NA Binti A merasa takut dan cemas, lalu korban NA Binti A berjalan cepat menghindari terdakwa, namun secara tiba-tiba dari arah belakang, salah satu tangan terdakwa memegang pantat korban NA Binti A dan sambil berputar badan kedepan korban NA Binti A, tangan yang satunya lagi memegang vagina korban NA Binti A.

Setelah memegang vagina korban NA Binti A, terdakwa langsung lari meninggalkan korban NA Binti A yang langsung berteriak karena kaget. Ketika tangan terdakwa menyentuh vagina korban NA Binti A, korban NA Binti A merasakan sentuhan keras tangan terdakwa ke vagina, yang walaupun saat itu korban NA sementara menggunakan rok sekolah.

Bahwa setelah kejadian, dalam keadaan menangis, korban NA Binti A langsung pergi ke rumah terdakwa untuk bertemu dan menyampaikan kepada istri terdakwa bahwa terdakwa telah kembali memegang vagina korban NA Binti A dan saat itu korban berkata pada istri terdakwa "ajar-ajari suami karena dua kalima nakasih begini", dan atas pemberitahuan korban, istri Terdakwa hanya mengatakan akan menegur suaminya agar tidak melakukan hal itu lagi.

Sebelumnya terdakwa juga pernah memegang vagina korban NA Binti A yang dilakukan dengan cara yang sama yakni dari arah belakang Terdakwa langsung menghalangi langkah korban NA Binti A dan saat itu langsung memegang vagina korban NA yaitu sekitar tahun 2014 pada saat korban duduk di bangku SMK kelas dua.

Atas kejadian tersebut, korban NA Binti A selalu merasakan takut dan cemas setiap bertemu dengan terdakwa. Terdakwa sebelumnya pernah melakukan perbuatan yang sama pada anak sekolah yang lainnya. pada saat kejadian korban menggunakan pakaian sekolah yaitu seragam putih dan rok panjang abu-abu.

2. Dakwaan Jaksaan Penuntut Umum

Pada dakwaan dalam perkara tindak pidana pencabulan dengan ancaman kekerasan terhadap anak pada putusan nomor 10/Pid.B/2016/PN.PKJ yang mana terdakwa Baharuddin oleh jaksa didakwa menggunakan dakwaan tunggal sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa BAHARUDDIN ALIAS BAHHA BIN MUSA pada hari Senin tanggal 09 November 2015 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di Jalan Pendidikan Kelurahan Biraeng Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep atau setidaknya pada waktu lain dibulan Nopember 2015 yang masih

termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap NA Binti A (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor tanggal 06 Juni 2005 lahir pada tanggal 12 April 1998) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi NA Binti A berjalan menuju sekolah dan disaat yang bersamaan saksi NA Binti A yang melihat Terdakwa yang sedang duduk sendiri di Pos ronda merasa takut terhadap terdakwa kemudian mengambil jalan lain untuk menghindari Terdakwa namun sekitar 3 (tiga) meter saksi korban melintas didepan Terdakwa tanpa diketahui saksi NA Binti A terdakwa mengikuti dan setelah memperhatikan keadaan jalan yang sunyi, dan arah belakang saksi NA Binti A tiba-tiba Terdakwa dengan gerakan yang cepat berputar kearah depan saksi NA Binti A dan mendekat saksi korban lalu tanpa berpikir panjang lagi tangan sebelah kiri Terdakwa langsung memegang alat kemaluan (vagina) saksi korban NA Binti A sebanyak 1 (satu) kali yang membuat saksi korban NA Binti A langsung berteriak ketakutan sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan saksi NA Binti A menuju rumah Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN Als. BAHA Bin MUSA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAHARUDDIN als. BAHA Bin MUSA, oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan, potong tahanan selama terdakwa menjalani penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju sekolah warna putih;
 - 1 (satu) lembar rok sekolah warna abu-abu;Dikembalikan kepada yang berhak yakni NA Binti A;

4. Analisis Penulis

Berdasarkan kasus posisi sebagaimana telah diuraikan di atas, yang mana terdakwa Baharuddin didakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan dengan ancaman kekerasan terhadap anak yaitu NA Binti A. Jaksa menggunakan dakwaan tunggal yaitu dakwaan ini hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.

Dalam kasus ini, dakwaan jaksa penuntut umum telah memiliki sifat dan hakekat dari suatu dakwaan, yang telah menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap, baik mengenai identitas terdakwa maupun mengenai uraian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan disertai dengan waktu dan tanggal perbuatannya serta tempat perbuatan itu berlangsung, sehingga dengan demikian maka menurut penulis dakwaan tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan.

Berdasarkan hasil analisis penulis, maka penulis berpendapat bahwa penerapan hukum pidana materiil pada perkara ini yakni diterapkan ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adapun ketentuan pada Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Kemudian yang dimaksud pada pasal 76E yaitu berbunyi:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Sehingga mengenai penerapan Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak;
3. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Sebelum menjelaskan uraian unsur-unsur yang terbukti dalam persidangan, terlebih dahulu pembuktian dalam persidangan menggunakan alat bukti yang diajukan oleh jaksa

yaitu berdasarkan Pasal 184 KUHP meliputi keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bukti surat dan barang bukti:

1. Keterangan Saksi-Saksi;

Keterangan saksi dalam kasus ini adalah alat bukti yang berupa keterangan dari saksi mengenai peristiwa tindak pidana pencabulan terhadap anak yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Dalam kasus ini saksi-saksi yang diajukan ada enam termasuk NA Binti A yang juga selaku korban.

2. Petunjuk;

Petunjuk dapat diperoleh hanya dengan cara mengolah alat bukti yang berupa Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa melalui kegiatan penyelidikan dan atau olah TKP dengan memperhatikan korelasi bukti segitiga antara saksi, pelaku, barang bukti.

Dalam perkara ini jaksa mengajukan barang bukti serta alat bukti lain berupa keterangan saksi, dan terdakwa sehingga dari adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan barang bukti maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 jo.

184 ayat (1) dan (2) KUHP sehingga diperoleh petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana.

3. Keterangan terdakwa;

Keterangan Tersangka adalah, apa yang terdakwa nyatakan dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui dan alami sendiri. Perlu diperhatikan bahwa penilaian keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya. Terdakwa dalam perkara ini yaitu Baharuddin alias Baha Bin Musa.

Adapun barang bukti yang digunakan dalam kasus ini antara lain:

1. 1 (satu) lembar baju sekolah warna putih;
2. 1 (satu) lembar rok sekolah warna abu-abu;

Dari unsur-unsur di atas maka penulis dapat menguraikan sebagai berikut:

3. Unsur Setiap Orang

Unsur “Setiap Orang” adalah menunjukkan bahwa siapa pelaku sebenarnya dari adanya perbuatan pidana atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini dan orang yang

diajukan ke depan persidangan adalah benar orang yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana (*strafbaar feit*), dan orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab, dengan demikian unsur ini menghendaki untuk tidak terjadinya Error In Persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan.

Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama BAHARUDDIN Alias BAHA Bin MUSA yang identitasnya sebagaimana telah termuat dengan lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dari identitas tersebut dipersidangan telah diperiksa dan dicocokkan dengan Terdakwa, dan dari keseluruhan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa. Oleh karenanya Terdakwalah yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum dan akan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Oleh karenanya menurut penulis berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

4. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak”

Dengan sengaja atau kesengajaan sering kali menjadi perdebatan dan polemik dikalangan para ahli dan praktisi hukum, karena *memorie vantoelichting* tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata dengan sengaja atau kesengajaan, sehingga kita hanya berpedoman dari adanya perbedaan antara dolus dan culpa dimana delik-delik culpa perbuatan dilakukan karena kealpaan sedangkan lawan dari kealpaan adalah kesengajaan.

Mahkamah Agung dari berbagai yurisprudensinya memberikan batasan yang lebih jelas tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut formil maupun materiil, sehingga “dengan sengaja” atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki.

Dalam berbagai doktrin ilmu hukum, kata sengaja atau kesengajaan dapat ditinjau dari dua teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan.

Menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudan dapat berbentuk kehendak untuk melakukan perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan diakukannya perbuatan tersebut.

Sedangkan dalam Teori pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuatnya atau dilakukannya itu dapat menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu.

Sengaja atau kesengajaan bisa dikaitkan dengan unsur opzet (kehendak) yang bisa dibedakan dalam kehendak sebagai kesengajaan (dolus) dan kehendak sebagai kealpaan (culpa).

Kemudian unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk merupakan unsur yang bersifat alternatif dimana jika salah satu perbuatan tersebut telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya telah dianggap memenuhi unsur tersebut.

Yang dimaksud dengan Anak, berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2013 Tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dimana ditemukan fakta bahwa korban NA Binti A berdasarkan akte kelahirannya lahir pada tanggal 12 April 1998 masih berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan masih bersekolah di SMK;

Terdakwa dalam memberi keterangan menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan dengan ancaman kekerasan terhadap korban. Akan tetapi, ancaman bukan hanya berupa kata-kata, akan tetapi juga merupakan sikap tubuh dari Terdakwa sehingga keberadaan terdakwa juga merupakan suatu ancaman untuk terjadinya suatu perbuatan.

Maka menurut penulis unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak” terpenuhi.

5. Unsur “Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Kata “Cabul” menurut R. Soesilo dalam penjelasan pasal 289 KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan / kesopanan atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin seperti cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya termasuk pula perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan namun tidak sampai terjadi keluar sperma sebagaimana layaknya hubungan suami istri untuk mendapatkan anak;

Unsur dari pasal ini juga bersifat alternatif dimana jika salah satu perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan - perbuatan yang lain telah dianggap memenuhi rumusan dari unsur tersebut. Sehingga perbuatan Terdakwa yang memegang alat kelamin korban yang dilakukan dengan cara Terdakwa dari arah belakang, lalu salah satu tangan terdakwa memegang pantat korban dan sambil berputar

badan kedepan korban, tangan yang lain memegang vagina korban maka telah memenuhi unsur dari pasal ini.

Sesuai dengan kasus di atas, penulis melakukan wawancara dengan salah satu Hakim yang mengadili kasus ini di Pengadilan Negeri Pangkajene, Ibu Raija Muis, S.H. (wawancara tanggal 4 Mei 2017) beliau menyatakan bahwa:

“Penerapan hukum pidana yang dilakukan oleh hakim sesuai karena unsur perbuatannya terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

Dengan pernyataan dari hakim di atas kemudian mengenai kasus pada putusan ini, dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pada Pasal yang telah diuraikan diatas Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka telah terbukti bahwa perbuatan terdakwa Baharuddin benar telah melakukan pencabulan dengan ancaman kekerasan terhadap korban NA yang masih berstatus sebagai anak.

Dengan demikian, berdasarkan pembahasan penulis di atas maka dapat dilihat dan disimpulkan bahwa penerapan hukum pidana materiil pada putusan 10/Pid.B/2016/PN.PKJ menurut hukum telah sesuai dan memenuhi unsur delik.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan pada perkara No 10/Pid.B/2016/PN.PKJ.

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak;
3. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” adalah menunjukkan bahwa siapa pelaku sebenarnya dari adanya perbuatan pidana atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini dan orang yang diajukan ke depan persidangan adalah benar orang yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana (strafbaar feit), dan orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab, dengan demikian unsur ini menghendaki untuk tidak terjadinya Error In Persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin MUSA yang identitasnya sebagaimana telah termuat dengan lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dari identitas tersebut dipersidangan telah diperiksa dan dicocokkan dengan Terdakwa, dan dari keseluruhan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa. Oleh karenanya Terdakwalah yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum dan akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karenanya menurut hemat Majelis berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak”

Menimbang bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kali menjadi perdebatan dan polemik dikalangan para ahli dan praktisi hukum, karena memorie vantoelichting tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata dengan sengaja atau kesengajaan, sehingga kita hanya berpedoman dari adanya perbedaan antara dolus dan culpa dimana delik-delik culpa perbuatan dilakukan karena kealpaan sedangkan lawan dari kealpaan adalah kesengajaan;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung dari berbagai yurisprudensinya memberikan batasan yang lebih jelas tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut formil maupun materiil, sehingga “dengan sengaja” atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki;

Menimbang bahwa dalam berbagai doktrin ilmu hukum, kata sengaja atau kesengajaan dapat ditinjau dari dua teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan diakukannya perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa sedangkan dalam Teori pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuatnya atau dilakukannya itu dapat menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang bahwa sengaja atau kesengajaan bisa dikaitkan dengan unsur opzet (kehendak) yang bisa dibedakan dalam

kehendak sebagai kesengajaan (dolus) dan kehendak sebagai kealpaan (culpa);

Menimbang bahwa Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk merupakan unsur yang bersifat alternatif dimana jika salah satu perbuatan tersebut telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya telah dianggap memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak, berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2013 Tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa sehingga ditemukan fakta hukum bahwapada hari Senin tanggal 09 November 2015 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di Kabupaten Pangkep Terdakwa telah memegang alat kelamin saksi NA Binti A. Bahwa awalnya saksi NA Binti A sedang berjalan menuju sekolah di SMK, kemudian saksi NA Binti A melihat dari jauh terdakwa sementara duduk di pos warga di dekat jalan masuk ke sekolah sehingga saksi NA Binti A merasa takut dan cemas, lalu saksi NA Binti A berjalan cepat menghindari terdakwa, namun secara tiba-tiba dari arah belakang, salah satu tangan terdakwa memegang pantat saksi NA Binti A dan sambil berputar badan kedepan saksi NA Binti A, tangan yang satunya lagi memegang vagina saksi NA Binti A. Bahwa setelah memegang vagina saksi NA Binti A, terdakwa langsung lari meninggalkan saksi NA Binti A yang langsung berteriak karena kaget. Bahwa ketika tangan terdakwa menyentuh vagina saksi NA Binti A, saksi NA Binti A merasakan sentuhan keras tangan terdakwa ke vagina, yang walaupun saat itu saksi NA Binti A sementara menggunakan rok sekolah;

Bahwa setelah kejadian, dalam keadaan menangis, saksi NA Binti A langsung pergi kerumah terdakwa untuk bertemu dan menyampaikan kepada istri terdakwa bahwa terdakwa telah kembali memegang vagina saksi NA Binti A dan saat itu istri Terdakwa berkata "ajar-ajari suamita karena dua kalima nakasih begini", dan atas pemberitahuan saksi, istri Terdakwa hanya mengatakan akan menegur suaminya agar tidak melakukan hal itu lagi. Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah memegang vagina saksi NA Binti A yang dilakukan dengan cara yang sama yakni dari arah belakang Terdakwa langsung menghalangi langkah saksi NA Binti A dan saat itu langsung memegang vagina saksi NA Binti A yaitu

sekitar tahun 2014 pada saat saksi duduk di bangku SMK kelas 2. Bahwa atas kejadian tersebut, saksi NA Binti A selalu merasakan takut dan cemas setiap bertemudengan terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dimana ditemukan fakta bahwa saksi korban NA Binti A berdasarkan akte kelahirannya lahir pada tanggal 12 April 1998 masih berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan masih bersekolah di SMK;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa yang awalnya sedang beristirahat di pos ronda kemudian melihat saksi NA Binti A lewat di depan terdakwa dan Terdakwa yang jantungnya sudah berdebar lalu mendekati saksi NA Binti A dari arah belakang, salah satu tangan terdakwa memegang pantat saksi NA Binti A dan sambil berputar badan kedepan saksi NA Binti A, tangan yang satunya lagi memegang vagina saksi NA Binti A. Bahwa setelah memegang vagina saksi NA Binti A, terdakwa langsung lari meninggalkan saksi NA Binti A yang langsung berteriak karena kaget. Bahwa ketika tangan terdakwa menyentuh vagina saksi NA Binti A, saksi NA Binti A merasakan sentuhan keras tangan terdakwa ke vagina, yang walaupun saat itu saksi NA Binti A sementara menggunakan rok sekolah. Bahwa dari pengakuan saksi NA Binti A bahwa saksi NA Binti A sudah 2 (dua) kali diperlakukan hal yang sama oleh Terdakwa dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi NA Binti A menjadi takut dan cemas ketika bertemu atau melihat Terdakwa, dan pada saat kejadian saksi NA Binti A sebenarnya sudah mulai takut dan cemas untuk melewati Terdakwa yang sedang berdiri di pos ronda. Bahwa serangkaian tindakan Terdakwa tersebut sudah merupakan tindakan ancaman dimana keberadaan Terdakwa di pos ronda tersebut tidak diduga oleh saksi NA Binti A dan saksi NA Binti A pun telah berusaha untuk menghindari terdakwa sehingga untuk melewati Terdakwa yang berdiri di pos ronda tersebut, saksi NA Binti A menjadi cemas dan takut;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam keterangannya menyatakan menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan dengan ancaman kekerasan terhadap saksi korban akan tetapi menurut Majelis hakim ancaman bukanlah hanya berupa kata-kata akan tetapi sikap tubuh dari Terdakwa dan keberadaan terdakwa juga merupakan suatu ancaman untuk terjadinya suatu perbuatan;

Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;

A.d. 3 Unsur “Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” Menimbang bahwa yang dimaksud “Cabul” menurut R.

Soesilo dalam penjelasan pasal 289 KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin seperti cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya termasuk pula perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan namun tidak sampai terjadi keluar sperma sebagaimana layaknya hubungan suami istri untuk mendapatkan anak;

Menimbang bahwa unsur dari pasal ini juga bersifat alternatif dimana jika salah satu perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan-perbuatan yang lain telah dianggap memenuhi rumusan dari unsur tersebut ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sehingga ditemukan fakta hukum bahwapada hari Senin tanggal 09 November 2015 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di Kabupaten Pangkep Terdakwa telah memegang alat kelamin saksi NA Binti A. Bahwa awalnya saksi NA Binti A sedang berjalan menuju sekolah di SMK, kemudian saksi NA Binti A melihat dari jauh terdakwa sementara duduk di pos warga di dekat jalan masuk ke sekolah sehingga saksi NA Binti A merasa takut dan cemas, lalu saksi NA Binti A berjalan cepat menghindari terdakwa, namun secara tiba-tiba dari arah belakang, salah satu tangan terdakwa memegang pantat saksi NA Binti A dan sambil berputar badan kedepan saksi NA Binti A, tangan yang satunya lagi memegang vagina saksi NA Binti A. Bahwa setelah memegang vagina saksi NA Binti A, terdakwa langsung lari meninggalkan saksi NA Binti A yang langsung berteriak karena kaget. Bahwa ketika tangan terdakwa menyentuh vagina saksi NA Binti A, saksi NA Binti A merasakan sentuhan keras tangan terdakwa ke vagina, yang walaupun saat itu saksi NA Binti A sementara menggunakan rok sekolah;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa yang memegang alat kelamin saksi NA Binti A yang dilakukan dengan cara Terdakwa dari arah belakang saksi NA Binti A, lalu salah satu tangan terdakwa memegang pantat saksi NA Binti A dan sambil berputar badan kedepan saksi NA Binti A, tangan yang satunya lagi memegang vagina saksi NA Binti A telah memenuhi unsur dari pasal ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju sekolah warna putih dan 1 (satu) lembar rok sekolah warna abu-abu yang disita dari Saksi NA Binti A, maka dikembalikan kepada saksi NA Binti A;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

2. Amar Putusan

MENGADILI

6. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN Alias BAHHA Bin MUSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan ancaman kekerasan kepada anak untuk melakukan perbuatan cabul”;
7. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
8. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
10. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju sekolah warna putih
 - 1 (satu) lembar rok sekolah warna abu-abuDikembalikan kepada saksi NA Binti A;
11. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

3. Analisis Penulis

Berbagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor putusan 10/Pid.B/2016/PN.PKJ, berdasarkan hasil penelitian penulis baik melalui wawancara terhadap hakim yang terkait terhadap perkara dalam tulisan ini, maupun melalui studi kepustakaan dari dokumen-dokumen yang telah disajikan di atas, maka penulis berpendapat bahwa sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan, hakim terlebih dulu mempertimbangkan

banyak hal. Diantaranya adalah unsur-unsur formil dan materiil telah terpenuhi, serta tidak ada keberatan dari Terdakwa mengenai dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana. Lebih rinci lagi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dikategorikan atas dua pertimbangan yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis berupa dakwaan Jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti. Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, adapun unsur-unsur dalam Pasal 82 Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menurut hakim telah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh jaksa serta harus didasarkan pada fakta.

Pertimbangan yang bersifat non yuridis berupa latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi dari terdakwa, keadaan ekonomi dan agama terdakwa.

Suatu proses keadilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (pidanaan) dan di dalam putusan itu majelis hakim menyatakan

pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya.

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pengambilan keputusan ini hendaknya majelis hakim dapat melihat dengan cermat kesesuaian fakta-fakta yang ada dengan alat bukti yang dihadirkan di persidangan (fakta persidangan).

Yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut sesuai dengan tuntutan penuntut umum karena melihat semua fakta-fakta persidangan terbukti secara sah terdakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan hanya semata-mata untuk memberikan efek jera kepada terdakwa, akan tetapi juga sebagai tindakan preventif agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Dalam perkara ini, hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa BAHARUDDIN alias BAHHA Bin MUSA selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak karena sanksi yang dijatuhkan sudah mengikuti ketentuan pasal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene yang menangani kasus ini yaitu Ibu Raija Muis, S.H (wawancara pada tanggal 4 Mei 2017) beliau mengatakan bahwa:

“Karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka kami selaku hakim memutuskan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Kami juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Pidana yang dijatuhkan yaitu selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan juga telah sesuai dengan ketentuan pada pasal 82 ayat (1) sehingga sudah benar hukuman yang kami jatuhkan.

Juga pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman yaitu keadaan yang memberatkan seperti perbuatan terdakwa dapat menimbulkan trauma terhadap korban. Kemudian keadaan yang meringankan seperti terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dihukum.”

Dari uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa penuntut umum telah terpenuhi dan dengan keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Maka penulis berpendapat bahwa pada perkara No. 10/Pid.B/2016/PN.PKJ telah mengandung unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.

Selain itu, penulis juga berpendapat tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam perkara No. 10/Pid.B/2016/PN.PKJ sudah tepat jika dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yang mana perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan akibat yang tidak diinginkan baik kepada korban maupun kepada keluarga korban, seperti trauma dan rasa malu, yang kemudian dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum. Maka dari beberapa hal inilah hakim dapat memperoleh fakta-fakta, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan pemberian hukuman penjara oleh hakim, maka

diharapkan dan dimungkinkan terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pencabulan dengan ancaman kekerasan terhadap anak dalam putusan nomor 10/Pid.B/2016/PN.PKJ yaitu menggunakan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penerapan pasal tersebut telah sesuai karena unsur-unsur tindak pidana dalam pasal terbukti telah terpenuhi. Karena perbuatan terdakwa memenuhi unsur melakukan perbuatan cabul kepada korban yang dilakukan dengan kekerasan terhadap korban yang berstatus anak.
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana terhadap terdakwa Baharuddin alias Baha bin Musa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dengan memperhatikan faktor yuridis dan non yuridis berupa fakta-fakta hukum seperti keterangan dari saksi-saksi, berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan dan keadaan-keadaan yang dapat

memberatkan dan meringankan terdakwa. Sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap perbuatan terdakwa telah terpenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dimana perbuatan terdakwa merupakan perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

B. Saran

1. Orang tua harus memberikan lebih banyak perhatian begitupun dengan pengawasan kepada anak-anaknya agar anak tidak lagi terjerumus dalam maraknya kejahatan kesusilaan termasuk pencabulan apa lagi sebagai korban.
2. Dalam penerapan hukum pidana terhadap delik Kesusilaan dalam hal ini anak sebagai korban pencabulan senantiasa diterapkan secara efektif dengan pengawasan dari segenap aparaturnya penegak hukum disertai anggota masyarakat dengan berbagai macam usaha dan ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Ahmad Kamil. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Arif Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademi Prassido: Jakarta.
- Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya: Bandung.
- _____. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. 1996. cet Pertama. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Edward Elgar, *Undang-undang Pornografi, No. 4928, Pasal. 1 ayat (4)* Indonesia.
- Eriyanto Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Fran Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- J.E Sahetapy. 1987. *Viktimologi Sampai Bung Rampai*, cet.I, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Leden Marpaung. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, cet 2 ,Siunar Grafika: Jakarta.
- _____. 2008. *Asas-Teori-Praktik-Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta
- Meljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta
- P.A.Lamintang. 2007. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cita Aditya Bakti: Bandung.
- Romli Atmasasmita. 1995. *Kapita selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandar Maju: Bandung.
- Soerjono Seokanto. 2008. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Acara Perdata*, cet 1. Visimedia: Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Topo Santoso. 1997. *Seksualitas Dan Hukum Pidana*. IDN-HILL-CO: Jakarta.

Wagiati Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. PT Refika Aditama: Bandung.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Republik Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan hukum

Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
Pidana

Undang-undang Nomor. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak

WEBSITE

<https://zulfanlaw.wordpress.com/2008/07/10/dasar-pertimbangan- hakim- dalam-menjatuhkan-putusan-bebas-demi-hukum/> Diakses pada tanggal 12 Februari 2017, pukul 20.30 WITA.

<http://setaaja.blogspot.co.id/2012/03/pertimbangan-sosiologis- dalam putusan.html/> Diakses pada tanggal 20 Februari 2017, pukul 10.45 WITA.